

**STRATEGI CHINA DALAM MEMPERTAHANKAN STATUS TETAP
DEWAN HAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA(PBB) TAHUN
2019-2023**

SKRIPSI

*Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Strata-1*



Sindi Refani Purnomo

201710360311297

**Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang**

2024

**STRATEGI CHINA DALAM MEMPERTAHANKAN STATUS
TETAP DEWAN HAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TAHUN 2019-2023**

Diajukan Oleh

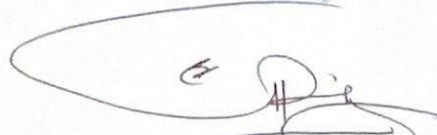
SINDI REFANI PURNOMO

201710360311297

Telah disetujui

Rabu, 27 Desember 2023

Pembimbing I



Ruli Inayah Ramadhono, M.Si.

Wakil Dekan I



Muhammad Choirur Rijal, M.Hub.Int

Ketua Program Studi
Hubungan Internasional



Dr. Dyah Estu Kurniawati, M.Si

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

SINDI REFANI PURNOMO

201710360311297

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
dan dinyatakan

L U L U S

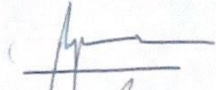
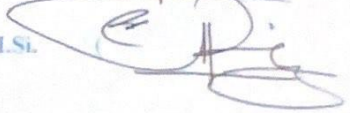
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar

Sarjana (S-1) Hubungan Internasional

Pada hari Rabu, 20 Desember 2023

Di hadapan Dewan Penguji

Dewan Penguji

1. **Hafid Adim Pradana, M.A.** ()
2. **Azza Bimantara, M.A.** ()
3. **Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si.** ()

Mengetahui,
Wakil




Dr. Rajat, M.Hub.Int

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sindi Refani Purnomo
NIM : 201710360311297
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Strategi China Dalam Mempertahankan Status Tetap Dewan Ham
Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) Tahun 2019-2023

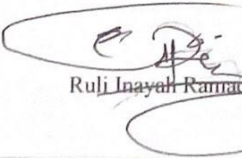
Pembimbing : 1. Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si

Kronologi Bimbingan :

Tanggal	Paraf Pembimbing	Keterangan
15/08/2023		Pengajuan Judul
22/08/2023		Revisi Pembahasan
29/08/2023		ACC Tugas Akhir

Malang, 27 Desember 2023

Menyetujui,
Pembimbing I


Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sindi Refani Purnomo
NIM : 201710360311297
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Strategi China Dalam Mempertahankan Status Tetap Dewan Ham
Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) Tahun 2019-2023

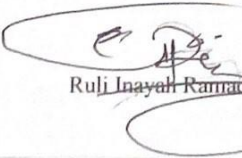
Pembimbing : 1. Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si

Kronologi Bimbingan :

Tanggal	Paraf Pembimbing	Keterangan
15/08/2023		Pengajuan Judul
22/08/2023		Revisi Pembahasan
29/08/2023		ACC Tugas Akhir

Malang, 27 Desember 2023

Menyetujui,
Pembimbing I


Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial * Ilmu Pemerintahan * Ilmu Komunikasi * Sosiologi * Hubungan Internasional
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Telp. (0341) 460948, 464318-19 Fax. (0341) 460782 Malang 65144 Pes. 132

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SINDI REFANI PURNOMO
NIM : 201910360311293
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Tugas Akhir dengan Judul :
STRATEGI CHINA DALAM MEMPERTAHANKAN STATUS TETAP DEWAN HAM PBB
TAHUN 2019 - 2023
adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TUGAS AKHIR INI DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 04 NOVEMBER 2023.
Yang Menyatakan,


.....SINDI REFANI PURNOMO

ABSTRAK

Sindi Refani Purnomo), (2017), (201710360311297), Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Hubungan Internasional, (Strategi China Dalam Mempertahankan Status Tetap Dewan Ham Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2019-2023), Dosen Pembimbing I: Ruli Inayah Ramadhon, S.Sos, M.Si.

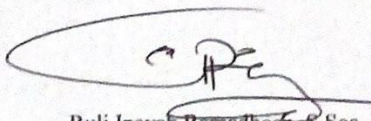
Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan strategi yang dilakukan oleh China dalam mempertahankan status tetapnya sebagai anggota Dewan HAM PBB dalam periode tahun 2019 hingga 2023. China merupakan salah satu negara dengan catatan pelanggaran HAM yang kontroversial, namun tetap berupaya memperkuat pengaruhnya di forum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu library research dengan menggunakan aplikasi Harzing Publish or Perish. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori diplomasi dan neorealisme. Hasil dari Kerjasama yang dilakukan menunjukkan bahwa China mengandalkan diplomasi aktif dan kemitraan strategis dengan negara-negara anggota ASEAN dan Asia lainnya untuk memperkuat posisinya. Selain itu, China juga memanfaatkan keanggotaan dalam blok regional dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara maju untuk memperoleh dukungan dalam mempertahankan status tetapnya di Dewan HAM PBB. Meskipun menghadapi kritik atas catatan pelanggaran HAM, China berhasil memanfaatkan kehadiran regionalnya dan berpartisipasi aktif dalam Dewan HAM untuk mempengaruhi agenda HAM di tingkat internasional. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami strategi dan peran China dalam isu-isu HAM global.

Kata Kunci: Dewan Ham; Perserikatan Bangsa-Bangsa; Neorealisme; Diplomasi

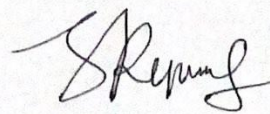
Malang, 17 Oktober 2023

Menyetujui,
Pembimbing,

Peneliti,



Ruli Inayah Ramadhon, S.Sos, M.Si



Sindi Refani Purnomo.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu'alaikum wr. wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian serta penulisan skripsi yang berjudul **“Strategi China Dalam Mempertahankan Status Tetap Dewan Ham Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) Tahun 2019-2023”** ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Penulis ingin memberikan ungkapan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang sangat besar dalam proses pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada jenjang pendidikan Strata-1 Program Studi Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada:

1. Kepada ayah saya tercinta Aris Purnomo dan Ibu saya tercinta Sarce Yobe, terimakasih atas semua doa serta dukunganya dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk selalu ada, selalu memberikan do'a, selalu memberikan contoh yang baik bagi penulis. Terima kasih selalu menyemangati dan bersabar untuk menunggu saya menyelesaikan skripsi ini. Tanpa ayah dan ibu saya tidak akan bisa melangkah hingga titik saat ini.
2. Saudara saya, Aryadi Sulthon Purnomo. Terima kasih atas dukungan yang tiada henti. Semoga kita bisa membahagiakan bapak ibu kita.
3. Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si. selaku dosen pembimbing saya yang telah sabar dan memberikan masukan serta bimbingan saat pengerjaan skripsi. Terima kasih telah memberikan waktu, tenaga serta pikirannya untuk membantu saya menghadapi berbagai kendala selama proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh jajaran dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang dan staff dari Laboratorium Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dukungan moral dan dukungan lainnya dalam hal apapun, pengalaman serta bimbingan kepada penulis selama mengikuti studi.
5. Kepada seluruh keluarga besar ibu dan saudara-saudra tercinta yang tanpa lelah memberikan dukungan, doa dan motivasi untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada sahabat saya Esty Putriana Dewi dan Zalza Iftitah Amalia, terima kasih atas canda tawa, energi positif yang kalian berikan selama ini. Terima kasih atas ilmu, pembelajaran, nasehat dan pengalaman yang selama ini kalian bagikan. Terima kasih atas dukungan semangat dan doa yang tak lelah kalian berikan hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik. Terima kasih telah menjadi teman dan sahabat baik bagi saya selama berkuliah di Malang, semoga pertemanan ini bisa terus terjalin dengan baik.

7. Terima kasih juga kepada orang yang paling istimewa dihati saya Akbar Bramantya yang telah memberikan waktu, dukungan, semangat, dan do'a serta segala bantuan selama penyusunan skripsi. Terima kasih telah mengingatkan untuk selalu menjalankan kehidupan dengan baik dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
8. I wanna thank me,for believing in me yang mampu bertahan hingga detik ini. Dan semua pihak yang tidak disebutkan diatas yang telah membantu dengan segala budi dan amal baiknya selama ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun gara menjadikan skripsi ini menjadikan skripsi ini lebih baik kedepannya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Malang, 2 September 2023

Peneliti,



Sindi Refani Purnomo



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PLAGIASI	x
A. LATAR BELAKANG	3
B. METODELOGI	8
C. TEORI/KONSEP	8
a. Teori Neorealisme.....	8
b. Diplomasi Multilateral dan Bilateral	9
D. HASIL DAN PEMBAHASAN	11
a. Strategi China Dalam memperkuat Pengaruhnya di Dewan Ham PBB	11
b. Kemitraan Strategis.....	14
c. Kemitraan Ekonomi dengan Negara-negara Maju	15
KESIMPULAN	18
REFERENCES	21



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MALANG



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HUBUNGAN INTERNASIONAL
hi.umm.ac.id | hi@umm.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : E.5.a/045/HI/FISIP-UMM/II/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Sindi Refani Purnomo
NIM : 201710360311297
Judul Skripsi : Strategi China dalam Mempertahankan Status Tetap Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2019-2023
Dosen Pembimbing : 1. Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si

telah melakukan cek plagiasi pada naskah Skripsi sebagaimana judul di atas, dengan hasil sebagai berikut:

	Tugas Akhir
	15%
Similarity	15%

*) Similarity maksimal 15% untuk setiap Bab.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai syarat pengurusan bebas tanggungan di UPT. Perpustakaan UMM.



Malang, 19 Februari 2024

Ka. Prodi HI,

Prof. Conda Yumitro, M.A., Ph.D.



Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 253 (Hunting)
F: +62 341 460 435

Kampus II

Jl. Bendungan Sutami No 188 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 551 148 (Hunting)
F: +62 341 582 060

Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang, Jawa Timur
P: +62 341 464 318 (Hunting)
F: +62 341 460 435
E: webmaster@umm.ac.id

**STRATEGI CHINA DALAM MEMPERTAHANKAN STATUS
TETAP DEWAN HAM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)
TAHUN 2019-2023**

Sindi Refani Purnomo, Ruli Inayah Ramadhoan, S.Sos, M.Si
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
Email: sindirefani14@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan strategi yang dilakukan oleh China dalam mempertahankan status tetapnya sebagai anggota Dewan HAM PBB dalam periode tahun 2019 hingga 2023. China merupakan salah satu negara dengan catatan pelanggaran HAM yang kontroversial, namun tetap berupaya memperkuat pengaruhnya di forum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu library research dengan menggunakan aplikasi Harzing Publish or Perish. Beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori diplomasi dan neorealisme. Hasil dari Kerjasama yang dilakukan menunjukkan bahwa China mengandalkan diplomasi aktif dan kemitraan strategis dengan negara-negara anggota ASEAN dan Asia lainnya untuk memperkuat posisinya. Selain itu, China juga memanfaatkan keanggotaan dalam blok regional dan kerjasama ekonomi dengan negara-negara maju untuk memperoleh dukungan dalam mempertahankan status tetapnya di Dewan HAM PBB. Meskipun menghadapi kritik atas catatan pelanggaran HAM, China berhasil memanfaatkan kehadiran regionalnya dan berpartisipasi aktif dalam Dewan HAM untuk mempengaruhi agenda HAM di tingkat internasional. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami strategi dan peran China dalam isu-isu HAM global.

Katakunci: Dewan Ham; Perserikatan Bangsa-Bangsa; Neorealisme; Diplomasi

Abstract

This article aims to describe the strategies undertaken by China in maintaining its permanent status as a member of the UN Human Rights Council in the period 2019 to 2023. China is one of the countries with a record of controversial human rights violations, but still seeks to strengthen its influence in international forums. This research is a descriptive qualitative research. The data collection technique used in this research is library research using the Harzing Publish or Perish application. Some of the theories used in this research are diplomacy theory and neorealism. The results of the cooperation conducted show that China relies on active diplomacy and strategic partnerships with ASEAN and other Asian member countries to strengthen its position. In addition, China also utilizes membership in regional blocs and economic cooperation with developed countries to gain support in maintaining its permanent status at the UN Human Rights Council. Despite facing criticism for its human rights record, China has successfully utilized its regional presence and active participation in the Human Rights Council to influence the human rights agenda at the international level. This research contributes to understanding China's strategy and role in global human rights issues.

Keywords: Human Rights Council; United Nations; Neorealism; Diplomacy

A. Latar Belakang

Dewan Ham PBB dibentuk pada tahun 2006 untuk menggantikan Komisi Ham PBB yang telah melemahkan fungsinya karena memilih sejumlah negara anggota dengan rekam jejak Ham yang perlu ditinjau kembali. Dewan Hak Asasi Manusia berfungsi sebagai pengawas dan mengungkap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di seluruh dunia dengan mengeluarkan rancangan resolusi. Kedudukan Dewan Hak Asasi Manusia dilaksanakan sesuai dengan resolusi Majelis Umum namun tidak dapat disejajarkan dengan resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial. Mekanisme pemantauan PBB akan dibantu oleh divisi-divisi Dewan, termasuk Laporan Negara (Country and Thematic Rapporteurs) dan Komisararis Tinggi Hak Asasi Manusia (Komite Penasihat Dewan Hak Asasi Manusia). Sistem pemantauan hak asasi manusia sendiri terbagi menjadi dua mekanisme, yaitu: mekanisme berbasis piagam, yaitu lembaga yang dibentuk melalui Piagam PBB; mekanisme berbasis perjanjian, yaitu mekanisme yang dibentuk melalui perjanjian hak asasi manusia yang ditetapkan berdasarkan sistem PBB, khususnya panitia. Hak untuk meninjau dan menilai praktik hak asasi manusia negara-negara anggota sesuai dengan kewajiban mereka berdasarkan Konvensi.

Dalam praktiknya, metode mekanisme berdasarkan piagam lebih bersifat politik dan kurang bersifat hukum daripada mekanisme berdasarkan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia. Secara keseluruhan, terdapat empat mekanisme utama untuk pengaduan dan pemantauan pelaksanaan hak asasi manusia, meskipun tidak semua mekanisme tersebut tercakup dalam tujuh perjanjian hak asasi manusia internasional. Keempat mekanisme tersebut adalah: yang pertama adalah mekanisme pelaporan (setiap 2-5 tahun laporan Negara-negara Pihak didiskusikan dan dilakukan kesimpulan pengamatan), yang kedua adalah mekanisme pengaduan individual, yang ketiga adalah pengaduan antar Negara dan yang keempat adalah mekanisme pengaduan antar negara. adalah mekanisme investigasi. Pada tahun 2020, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menuduh Tiongkok melakukan genosida terhadap warga Muslimnya. China merupakan negara maju dengan perekonomian yang cukup besar, namun nyatanya negaranya sendiri masih menyimpan banyak permasalahan internal yang tidak akan pernah ada habisnya.

Salah satu masalah internal Tiongkok adalah pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas Muslim Uyghur. Suku Uyghur merupakan etnis minoritas di wilayah Xinjiang, Tiongkok, mayoritas warga Uyghur beragama Islam ialah warga Turki. Negara-negara Barat memahami hak asasi manusia sebagai seperangkat nilai-nilai dasar yang berlaku secara universal bagi semua orang, tanpa memandang keberagaman suku, agama, ras, atau etnis, seperti yang dikatakan Donnelly yang dikutip oleh Aleksius Jemadu: "Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dinikmati seseorang sebagai manusia." Oleh karena itu, karena sifatnya yang universal, segala bentuk intervensi di negara lain untuk menjaga hak asasi manusia adalah hal yang wajar (Studi et al., 2015).

Pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang dialami oleh umat Islam Uyghur telah menarik perhatian dunia internasional, yang mengecam tindakan Tiongkok terhadap kaum Uyghur, bahkan menjadi isu yang berulang kali dibahas oleh PBB. Respon masyarakat internasional terhadap isu kemanusiaan Muslim Uyghur di Tiongkok kemudian terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang mendukung Muslim Uyghur dan kubu yang mendukung otoritas Tiongkok. Respons dunia terhadap masalah kemanusiaan di Tiongkok agak aneh, dimana negara-negara Barat yang mayoritas penduduknya non-Muslim seperti Inggris, Perancis, Jepang, Australia, Kanada, Selandia Baru dan 18 negara Eropa lainnya termasuk dalam kelompok ini. Mendukung negara Muslim Uyghur dan mengutuk tindakan Tiongkok terhadap Muslim Uyghur. Dukungan Barat terhadap Muslim Uyghur diwujudkan dalam bentuk surat pernyataan kepada Komisaris Tinggi PBB yang mendesak pemerintah Tiongkok untuk mengakhiri penahanan massal dan penindasan yang sewenang-wenang. (Putri & Ahmadi, 2021) Menurut laporan New York Times, surat itu disampaikan pada hari Senin dan dirilis pada hari Rabu, 11 Juli 2019.

Banyak negara Islam yang mayoritas penduduknya Muslim mendukung tindakan otoritas Tiongkok, termasuk Arab Saudi. Dukungan negara-negara Islam terhadap pemerintah Tiongkok, pertama ialah tidak ikut serta dalam komentar-komentar negatif atas perlakuan Tiongkok terhadap saudara-saudari Muslim di Xinjiang, atau dengan kata lain, negara-negara Islam tersebut memilih bungkam atas diskriminasi tersebut. Kedua, negara-negara ini juga menandatangani surat dukungan terhadap Tiongkok dan mengirimkannya ke Dewan Hak Asasi Manusia dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Raharjo, 2019). Berikut adalah beberapa negara yang menandatangani surat dukungan untuk China yang mana mayoritasnya adalah negara Islam: Aljazair,

Angola, Bahrain, Belarusia, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Kamboja, Kamerun, Kepulauan Komoro, Pakistan, Kuba, Republik Demokrat Kongo, Mesir, Eritrea, Gabon, Kuwait, Laos, Myanmar, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Filipina, Qatar, Rusia, Arab Saudi, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Tajikistan, Togo, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Venezuela, dan Zimbabwe.

Penafsiran negara-negara non-Barat, mengenai apa yang dianggap sebagai definisi universal hak asasi manusia sering kali menjadi alat politik untuk menundukkan negara lain. Penggunaan klaim hak asasi manusia sebagai strategi utama untuk menantang negara, untuk membatasi penantang internal, atau untuk membenarkan kebijakan luar negeri telah menghasilkan repertoar baru dari aktivisme politik yakni repertoar hak asasi manusia. (Dunia et al., 1988).

Kasus pelanggaran Ham yang terjadi di China menjadi isu yang menarik dikaji diakrenakan China dengan kembali terpilih menjadi dewan Ham tetap PBB 2021-2023 dimana sudah menjadi rahasia umum bahwa negaranya memiliki catatan pelanggaran Ham yang paling buruk didunia, dan juga pengaruhnya terhadap negara-negara didewan yang menolak untuk diskusi terkait kasus di Xinjiang. Penelitian terdahulu terkait China dan kasus Ham yang terjadi dinegaranya sudah banyak dilakukan, diantaranya penelitian terdahulu berjudul *“Resistensi etnis Uighur terhadap Pemerintah China”* Konflik di Xinjiang bermula ketika keinginan masyarakat Uighur memberontak terhadap pemerintah China untuk merdeka. Kepentingan pemerintah Tiongkok di wilayah Xinjiang mencakup kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, menjadikan Tiongkok kontroversial dalam mempertahankan Xinjiang sebagai wilayah otonom Tiongkok. Hal ini diperkuat oleh penelitian lainnya yang berjudul *“The human rights repertoire: its strategic logic, expectations and tactics”* dari Margaret Hagan dalam tulisannya dimana penggunaan klaim hak asasi manusia sebagai strategi utama untuk menantang negara, untuk membatasi penantang internal, atau untuk membenarkan kebijakan luar negeri telah menghasilkan repertoar baru dari aktivisme politik: repertoar hak asasi manusia. Meningkatnya jumlah kampanye penantang, seperti kampanye Uyghur mengandalkan repertoar sebagai satu-satunya taktik mereka untuk mencapai perubahan politik. Repertoar hak asasi manusia adalah strategi reaktif, tetapi bukan strategi pasif. Selanjutnya penelitian yang berjudul *“Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Xinjiang Cina Studi Kasus: Muslim Uighur Tahun 2014-2018”* dari Nurul Hanifah dan Fahlesa Wisa Fahru Munabari dalam tulisannya John Fisher Direktur Jenewa mengatakan Tiongkok telah bekerja di belakang

layar untuk melemahkan mekanisme hak asasi manusia PBB selama bertahun-tahun. Namun meningkatnya kemarahan global atas penganiayaan terhadap Muslim di Xinjiang membuat Tiongkok panik dan menggunakan tekanan publik dan swasta untuk mencegah tindakan internasional yang terkoordinasi. Hal ini diperkuat oleh penelitian lainnya yang berjudul ***“China’s Influence on Asian States during the Creation of the U.N. Human Rights Council: 2005–2007”***. artikel ini membahas tentang apa yang diinginkan pemerintah China telah berkontribusi secara langsung atau secara kreatif untuk penyediaan barang publik global. Namun, Beijing menggunakan pengaruhnya untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya dalam pengaturan multilateral belum dipelajari secara mendalam. Ini sebagian karena basis pembuktian untuk menentukan bagaimana ia berinteraksi dengan orang lain dalam apa yang sering disebut pertemuan tertutup, yang terutama melibatkan peserta pemerintah, dan yang memberi China peluang untuk terlibat dalam negosiasi formal dan informal, meningkatkan batasan tentang apa yang bisa dilakukan ditemukan. Selanjutnya penelitian yang berjudul ***“China and the Global Reach of Human Rights”*** dari Yongjin Zhang and Barry Buzan ini membahas hubungan kontroversial dan paradoks antara China dan tata kelola global hak asasi manusia. Ini memerlukan upaya untuk melampaui keberadaan retorika hak asasi manusia yang ada di mana-mana untuk memeriksa keterlibatan komunikatif China dengan hak asasi manusia baik sebagai proses legitimasi sosial dan politik dan sebagai masalah moral dalam skala global.

Upaya China dalam mempertahankan eksistensinya di Dewan HAM PBB terdapat dalam penelitian yang berjudul ***“China as a peacekeeper Past, present, and future”*** oleh Christoph Zürcher yang berisi tentang peran China dalam penjaga perdamaian PBB. Tiga puluh tahun kemudian pada akhir 2019, Tiongkok berpartisipasi dalam sembilan operasi penjaga perdamaian, termasuk lima besar dan menjadikannya kontributor terbesar kedua dari semua negara anggota. Evolusi ini mengejutkan akan tetapi menjadi warga negara yang baik di PBB jelas bukan satu-satunya motivasi bagi China untuk menjadi penjaga perdamaian yang penting. Peningkatan keterlibatan dalam pemeliharaan perdamaian juga mencerminkan meningkatnya kepercayaan diri China untuk menjadi dan dilihat sebagai kekuatan besar yang bertanggung jawab, dan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan reputasi sebagai rekan kekuatan besar lainnya. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang berjudul ***“Pengaruh Investasi China di Ethiopia”*** oleh Posmanto Marbun berisi tentang Ethiopia menjadi salah satu negara utama bagi investasi ekonomi Tiongkok

di benua Afrika, letak yang strategis menjadi titik lompatan di Tanduk Afrika dan juga kedekatannya dengan pasar Asia Tengah. Selain posisi strategis geopolitiknya, keunggulan demografis Ethiopia juga menjadikannya pusat Uni Afrika dan memberikan kontribusi penting terhadap urusan internasional Afrika. Keunggulan ini telah menarik minat Tiongkok untuk berinvestasi dan memberikan pengaruh di berbagai bidang. Pengaruh tersebut berasal dari kerja sama Selatan-Selatan yang terjalin antara Tiongkok dan Ethiopia. Hal serupa juga terdapat dalam penelitian yang berjudul ***“Meningkatnya Power China di Indonesia melalui soft power (studi kasus Chinese bridge competition)”*** oleh Linda berisi tentang Pentingnya opini publik dalam merumuskan berbagai kebijakan luar negeri negara. Opini publik merupakan kunci pemahaman internasional suatu negara. Menyadari pentingnya fakta tersebut, Tiongkok telah melakukan berbagai upaya diplomasi, termasuk menyelenggarakan Chinese Bridge Competition. Kegiatan ini dinilai sebagai upaya memperluas kekuatan Tiongkok (khususnya soft power) di dunia, termasuk Indonesia. Salah satu sumber soft power terpenting yang digunakan Tiongkok adalah budaya. Selanjutnya penelitian yang berjudul ***“Beijing Consensus: peluang china menghadapi dominasi Amerika Serikat dalam perekonomian global”*** oleh Diah Kartika Permatasari menjelaskan tentang model pembangunan China yang disebut Beijing Consensus yang menjadi peluang China menghadapi dominasi Amerika Serikat didalam perekonomian global. Dengan konsep economic power Adam Smith dari paradigma merkantilis, kemampuan pemerintah Tiongkok dalam menetapkan kebijakan liberalisasi ekonomi ala Tiongkok (Beijing Consensus) telah mempengaruhi cara pandang tatanan internasional terhadap kebijakan yang ada di negara-negara berkembang saat ini. Tiongkok menggunakan hal ini sebagai peluang untuk memperluas jaringan perdagangan dan hubungan baik dengan seluruh negara di dunia dan berupaya melemahkan bahkan bersaing dengan posisi dan dominasi Amerika Serikat yang telah ada. Hal ini diperkuat dengan penelitian, berjudul ***“Hak veto dewan keamanan PBB dan Asas Equality of The State dalam era globalisasi”*** oleh nanda indrawati sebagaimana diketahui, kesetaraan kedudukan tidak dipertimbangkan di Dewan Keamanan PBB, karena hanya anggota tetap Dewan Keamanan yang mempunyai hak untuk memveto keputusan. Hak ini sering digunakan dalam menjalankan politik luar negeri untuk melindungi kepentingan dalam hubungan dengan sekutu. Kesimpulan dari artikel ini adalah semua negara pada dasarnya berada pada posisi yang sama, namun keadaan yang terjadi saat ini adalah negara-negara yang memiliki kekuatan yang kuat mempengaruhi negara lain. Hak veto tersebut pada

gilirannya menunjukkan keistimewaan kelima pendiri PBB dibandingkan negara lainnya.

Dengan latarbelakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; “Bagaimana strategi China dalam mempertahankan status dewan tetap Ham PBB di tahun 2023?”. Dimana penelitian ini akan menjelaskan tentang adanya kepentingan China terhadap negara-negara anggota PBB untuk mempertahankan kedudukannya di dewan keamanan Ham PBB. Kemudian, penelitian ini juga menjelaskan bagaimana peran dan upaya China dalam menangani opini negara-negara anggota PBB terhadap kasus Ham yang terjadi di negaranya.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan sebuah fenomena baik fenomena tersebut merupakan fenomena yang terjadi secara alamiah maupun buatan manusia. Menurut Bogdan dan Biklen (1992) penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan sebuah tindakan dari individu, kelompok atau organisasi guna memperoleh pemahaman dari analisa yang dilakukan (Rahmat, 2009). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni *Library Research* dengan menggunakan aplikasi Harzing Publish or Perish untuk menghasilkan literatur seperti buku, jurnal, makalah, maupun artikel yang berkaitan dengan bagaimana upaya diplomasi China dalam mempertahankan status dewan tetap Ham PBB serta akibat yang ditimbulkan.

Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yakni berupa penelitian yang sudah ada sebelumnya untuk menunjang kebutuhan data terkait, penulis dapat menggambarkan mengenai fakta-fakta keadaan sebagaimana adanya dengan cara menganalisis data secara kronologis, dimulai dari fakta yang terjadi di lapangan, yakni mengenai pengaruh besar China di PBB agar kembali terpilih menjadi anggota tetap dewan keamanan Ham PBB dilihat dari kepentingan negara-negara di PBB, seberapa berpengaruh hak veto China untuk kepentingan nasional negaranya dan juga pengaruhnya di negara-negara Internasional di bidang ekonomi, dan militer. Dengan menggunakan teknik ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat menyediakan jawaban yang sangat rinci terhadap penelitian ini dengan rentang waktu 2019-2023.

C. Teori/Konsep

Teori Neorealisme

Neorealisme tidak meyakini bahwa sifat konfliktual manusia berdampak pada

perilaku bernegara. Neorealisme berfokus pada perilaku negara yang dipengaruhi oleh kondisi dalam sistem internasional (Quinn & Gibson, n.d.-a). Neorealisme meyakini bahwa dalam politik internasional yang berpengaruh adalah struktur anarki internasional yang memaksa negara melakukan tindakan agresif. Neorealis percaya bahwa struktur internasional dirancang untuk menjadi anarkis dan tidak mempunyai wewenang untuk mengatur hubungan antar negara. Dalam anarki, kemungkinan suatu negara menyerang negara lain atau diserang oleh negara lain tidak dapat diprediksi. Situasi ketidakpastian yang dialami oleh negara mengakibatkan negara tersebut berusaha untuk mencapai keamanan dan kekuasaan yang sebesar-besarnya (Quinn & Gibson, n.d.-a). Kekuasaan dalam perspektif neorealis merupakan kemampuan material yang dapat dikuasai oleh negara. Politik internasional dicirikan oleh pengejaran dan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan (Maliki, 2022). Booth (2011) mengemukakan bahwa ada empat argumen utama yang mendukung neorealisme: struktur internasional bersifat anarkis; negara dianggap sebagai aktor utama dan mengikuti prinsip-prinsip yang terpadu; setiap negara ditentukan oleh upayanya untuk mencari keamanan pribadi (survival); pentingnya pola distribusi tenaga listrik berdasarkan kemampuan atau kekuatan masing-masing negara (Nye, n.d.).

Ada dua jenis neorealisme, yaitu neorealisme defensif dan neorealisme ofensif. Realisme defensif didasarkan pada argumen Robert Jervis (1978) tentang dilema keamanan dan argumen Waltz (1979) mengenai balance of power (Telbami, 2002). Realisme defensif menyatakan bahwa negara tidak boleh menggunakan kekuatan yang berlebihan karena sistem internasional pada akhirnya akan mendorong aktor lain merasa terancam dan berbalik melawan negara (Kotz, 2002). Dalam hal ini, negara-negara anggota PBB yang bekerja sama dengan Tiongkok akan berpihak pada Tiongkok dan tidak berpartisipasi dalam diskusi mengenai kasus hak asasi manusia di Xinjiang. Sebaliknya, realisme ofensif memandang bahwa kekuatan adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara. Tujuan negara berinteraksi adalah untuk menjadi hegemon. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan harus berorientasi pada pencapaian kekuatan maksimal (Maliki, 2022).

Diplomasi Bilateral

Menurut The Oxford Handbook of Modern Diplomacy (2013), diplomasi bilateral merupakan landasan dasar untuk mengembangkan hubungan antar negara. Wujud dari pola diplomasi tersebut adalah kedua negara berinteraksi karena saling membutuhkan, saling mempengaruhi atau mendominasi, dan memperoleh keuntungan demi kepentingan

nasional. Dalam hubungan antar negara, diplomasi bilateral dilakukan oleh dua negara guna mengembangkan hubungan yang baik dan berkelanjutan antara kedua negara. Diplomasi bilateral biasanya dapat berbentuk dialog, pertemuan, atau interaksi sosial lain yang lebih intens dan intim antara dua negara untuk menjalin hubungan, saling membantu, dan kerja sama untuk kepentingan bersama. Tujuan diplomasi bilateral adalah untuk menyatukan tujuan dan kepentingan bersama kedua negara. Menurut mereka bahwasanya diplomasi bilateral pada dasarnya adalah suatu pola diplomasi yang dilakukan oleh dua negara menggunakan prinsip hubungan timbal balik, sehingga ketika suatu negara membutuhkan bantuan dari negara lain maka di lain hari ia juga akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan.

Diplomasi bilateral tidak lebih dari upaya membangun hubungan yang mengedepankan keberlangsungan hidup dan kepentingan nasional kedua negara. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika diplomasi bilateral sering disebut sebagai model diplomasi yang paling efektif karena hanya melibatkan dua negara yang memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Model diplomasi bilateral sebenarnya dinilai memiliki banyak fleksibilitas sehingga lebih mudah mencapai kompromi (Putri & Ahmadi, 2021). Hal ini mengacu pada hubungan strategis yang hanya melibatkan dua negara yang lebih intim. Hubungan kedua negara juga berfokus pada politik dan budaya. Hal ini merupakan langkah Tiongkok untuk melakukan kunjungan diplomatik dan kenegaraan berdasarkan kepentingan nasionalnya untuk terpilih kembali menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB, serta melakukan kerja sama kedua negara di bidang politik, kebudayaan, pendidikan, perekonomian dan bidang lainnya negara (Helwig et al., n.d.).

Diplomasi Multilateral

Diplomasi multilateral erat kaitannya dengan multilateralisme. Oleh karena itu, James P. Muldoon memaparkan model diplomasi tersebut melalui pembahasan multilateralisme dalam *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy* (2013). Multilateralisme adalah aliansi setidaknya tiga negara untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasional. Peran multilateralisme adalah untuk mengekang negara-negara besar, mencegah unilateralisme, dan memberikan kesempatan kepada negara-negara kecil untuk bersuara dan memilih opsi kelangsungan hidup mereka. Multilateralisme dapat diartikan sebagai pemerintahan global yang mengatur banyak negara, prinsip utamanya adalah meminimalkan unilateralisme, yang diyakini akan meningkatkan kemungkinan negara kuat mendominasi negara lemah sehingga meningkatkan konflik

internasional. Oleh karena itu, kesenjangan kekuasaan dapat diatasi dengan mengendalikan negara adidaya melalui tindakan kolektif agar mereka tidak berperilaku tidak adil terhadap negara yang lebih lemah. Negara-negara maju juga menyetujui perjanjian diplomatik multilateral dengan menetapkan aturan.

Diplomasi multilateral adalah pengelolaan hubungan internasional antara tiga negara atau lebih melalui negosiasi melalui perwakilan diplomatik atau pemerintah. Idealnya, agar diplomasi multilateral bisa berhasil, diplomasi harus bersifat universal dan semua pihak harus bekerja sama. Tujuan diplomasi multilateral harus dicapai melalui perdebatan, diskusi dan kompromi, namun pada akhirnya akan ditentukan oleh suara mayoritas dalam pemilihan umum yang demokratis. Ada perbedaan mendasar antara diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral. Pada diplomasi multilateral, kerjasama antar negara-negara di seluruh dunia biasanya dilakukan pada suatu lembaga internasional seperti International Non-Governmental Organizations (INGO), International Conferency, dan Summit Meetings. Contohnya yakni Uni Eropa (UE) dan PBB. Sementara itu, diplomasi bilateral hanya dilakukan oleh kedua negara secara non-forum. Jadi pada dasarnya diplomasi multilateral merupakan diplomasi yang paling berguna untuk meningkatkan perundingan multipihak selain meningkatkan intensitas diplomasi bilateral yang sudah dilakukan. Hal ini disebabkan, pertama, diplomasi multilateral memberikan kesempatan untuk membahas isu-isu kepentingan bersama yang berada di luar agenda formal. Kedua, mediator dengan kekuasaan penuh dapat mengadakan pertemuan multilateral untuk memulai perundingan bilateral guna membahas isu-isu mendasar yang sebelumnya diadakan di tempat lain. Diplomasi multilateral mempunyai banyak keuntungan. Pertama, memperkuat kemungkinan pemisahan diri. Permasalahan dapat dipantau terus menerus. Kedua, ciptakan lobi pemecahan masalah. Selain itu, bantuan teknis dapat diberikan kepada negara-negara yang membutuhkan.

D. Hasil dan Pembahasan

Strategi China Dalam memperkuat Pengaruhnya di Dewan Ham PBB

Ekonomi China sangat bergantung terhadap perusahaan barat yang dimana perdagangan tersebut dipengaruhi oleh investasi dari perusahaan asing. Meningkatnya perekonomian China mendatangkan rintangan yang tidak sedikit. Demi mencapai stabilitas negaranya, China masih terus berupaya untuk mempertahankan posisinya di dunia internasional, untuk melindungi negaranya dari kritik maupun persepsi buruk

mengingat banyak kasus Ham yang terjadi dinegaranya. Sebagai anggota tetap Dewan Ham PBB, China berupaya memperbaiki citranya di dunia untuk mencapai kepentingan nasionalnya.(Quinn & Gibson, n.d.-b) Bagi China diplomasi soft power dan manajemen citra merupakan aspek yang sangat penting karena dapat membuat China memenangkan aliansi untuk mencapai kepentingan negaranya. Hal ini menjadi komponen yang pokok dalam membentuk kekuatan nasional yang komprehensif, termasuk ekonomi, militer dan kekuatan politik. Kebijakan luar negeri negara juga didasarkan pada prinsip perdamaian dan harmonisasi dunia. Sesuai prinsip dasar kebijakan ini, Tiongkok mencari berbagai cara yang tidak mengutamakan kekerasan dan perang, namun negaranya mengutamakan cara-cara moderasi dan persuasi.

Jika kita menelaah penggunaan sistem veto (Dorosh & Ivasechko, 2018), sejak awal digunakan untuk melindungi kepentingan para pendiri PBB yang tujuannya hanya negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua (A. Muhammad, 2003). Ketika Dewan Keamanan dibentuk pada tahun 1948, berdasarkan Pasal 27 Piagam PBB, perwakilan dari Inggris, Tiongkok, Uni Soviet, Amerika Serikat, dan Prancis ditetapkan menjadi anggota tetap Dewan Keamanan dan mempunyai hak veto. Hingga saat ini, persoalan veto masih membebankan legitimasi Dewan Keamanan PBB. Dengan memiliki hak veto, anggota tetap dapat melakukan perubahan besar-besaran terhadap substansi resolusi kapan saja. Faktanya, hak veto dapat mengancam dikeluarkannya resolusi yang dianggap tidak menguntungkan negara atau sekutunya. Di sisi lain, perwakilan berbagai negara di PBB kerap mengungkapkan bahwa anggota tetap Dewan Keamanan selalu saling mengancam untuk menggunakan hak veto dalam konsultasi tertutup untuk mencapai kepentingannya sendiri, tanpa peduli apakah ada kritik. Pendekatan ini sering disebut sebagai “closet veto”(FIRDAUS NUZULA.FISIP Neorealism, n.d.).

Pada pertengahan tahun 1990-an, Gerakan Non-Aligned Movement berulang kali menegaskan tidak mendukung penggunaan hak veto karena sama saja dengan memberikan hak veto. Jaminan atau eksklusivitas dan dominasi peran anggota tetap Dewan Keamanan. Meskipun para komisioner masih mengakui bahwa veto harus menjadi upaya terakhir, kenyataannya mereka telah berulang kali menggunakan veto yang tersembunyi. Strategi China untuk mempertahankan status tetap di Dewan HAM PBB meskipun catatan pelanggaran HAM yang kontroversial melibatkan berbagai pendekatan yang kompleks dan diplomatis. China telah menggunakan berbagai taktik untuk menghadapi kritik dari negara-negara lain dan mencapai dukungan yang cukup untuk mempertahankan posisinya.

Pertama, China telah berfokus pada diplomasi aktif dan berusaha untuk membangun aliansi dengan negara-negara lain yang memiliki pandangan sejalan. Melalui diplomasi yang cerdas, China mencoba untuk mempengaruhi opini dan mendapatkan dukungan dari negara-negara mitra yang berbagi kepentingan strategis dengannya. (Putri & Ahmadi, 2021).

Dengan membangun aliansi seperti ini, China menciptakan jaringan dukungan yang dapat membantu dalam pemilihan dan pemertahanan status tetap di Dewan HAM. China telah melakukan diplomasi aktif dengan berbagai negara anggota PBB untuk membangun kemitraan strategis(Purwanto, n.d.). Melalui pertemuan bilateral, forum regional, dan kunjungan tingkat tinggi, China mencari dukungan dan kesepahaman dengan negara-negara lain yang memiliki pandangan sejalan. Dengan membangun aliansi dan kemitraan yang kuat, China dapat memperkuat posisinya di Dewan HAM dan mempengaruhi keputusan penting yang berkaitan dengan hak asasi manusia.(Prayuda & Sundari, n.d.)

Diplomasi Aktif:

- a. Pertemuan Tingkat Tinggi: China secara rutin melakukan pertemuan tingkat tinggi dengan pemimpin negara-negara anggota PBB untuk membangun hubungan yang kuat dan berkomunikasi mengenai isu-isu penting, termasuk isu-isu HAM. Contoh: Pada tanggal 21 Januari 2020, Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Beijing untuk membahas isu-isu global termasuk hak asasi manusia. Pertemuan ini menunjukkan upaya China dalam membangun hubungan yang kuat dengan PBB dan pemimpin dunia untuk mempengaruhi agenda HAM secara positif.
- b. Kunjungan Resmi: Para pejabat tinggi China secara teratur melakukan kunjungan resmi ke negara-negara lain untuk membahas isu-isu penting dan memperkuat hubungan bilateral.
- c. Diplomasi Publik: China menggunakan media dan komunikasi publik secara aktif untuk mempromosikan pandangannya tentang isu-isu HAM dan memperbaiki citra internasionalnya. Contoh: Pada tanggal 18 September 2020, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, berpidato di Sidang Majelis Umum PBB. Dia menegaskan komitmen China terhadap multilateralisme, mengadvokasi kerja sama internasional, dan menekankan pentingnya hak asasi manusia dengan menggarisbawahi keberagaman budaya dan pandangan tentang HAM.
- d. Forum Regional: China berpartisipasi aktif dalam forum-forum regional seperti KTT ASEAN, Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), dan Organisasi Kerjasama

Shanghai (SCO) untuk memperkuat hubungan regional dan mempengaruhi isu-isu HAM dalam konteks regional.

Kemitraan Strategis:

Kemitraan dengan Negara Berkembang: Tiongkok telah menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara berkembang, khususnya negara-negara Afrika dan Asia Tenggara. Hal ini mencakup kerja sama ekonomi, bantuan pembangunan dan pertukaran diplomatik yang intensif. Tiongkok juga memiliki kemitraan yang kuat dengan beberapa negara Afrika dan Asia Tenggara. Forum Kerja Sama Tiongkok-Afrika adalah salah satu platform penting bagi Tiongkok dan negara-negara Afrika untuk memperkuat kerja sama ekonomi, sosial, dan politik.

Respon Arab Saudi ialah dengan mengklaim bahwa dirinya adalah negara Islam, menganggap Islam sebagai faktor paling fundamental yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya, dan selalu mengutamakan isu-isu yang berkaitan dengan Islam, khususnya isu-isu minoritas Muslim dunia. Di saat yang sama, terkait isu diskriminasi terhadap warga Uighur, mereka justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan fitrah negara. Arab Saudi dan 36 negara mayoritas Muslim lainnya setuju dengan pembelaan pemerintah Tiongkok bahwa tindakan mereka terhadap Muslim Uighur berfungsi sebagai “pusat pelatihan” untuk membantu membasmi ekstremisme dan memberikan keterampilan baru. Putra Mahkota Mohammed bin Salman menyampaikan langsung kepada Presiden Tiongkok Xi Jinping bahwa Arab Saudi menghormati hak Tiongkok untuk mengambil tindakan anti-terorisme dan deradikalisasi guna menjaga keamanan nasional. Tentu saja Arab Saudi telah terjerumus ke dalam jebakan yang disiapkan oleh Tiongkok (Putri & Ahmadi, 2021).

Tindakan Tiongkok terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang adalah bagian dari strategi yang didukung oleh banyak negara, terutama negara-negara Islam. Tiongkok telah melakukan investasi besar-besaran di negara-negara di Timur Tengah, Asia, dan Afrika dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari inisiatif kebijakan luar negerinya atau Belt and Road Initiative (BRI). Negara-negara di kawasan ini, termasuk Arab Saudi, telah menerima investasi mulai dari infrastruktur hingga telekomunikasi. Melalui kebijakan Belt and Road ini, pemerintah Tiongkok berhasil membungkam negara-negara Islam dan mayoritas Muslim atas tindakan mereka di Xinjiang (Nashrullah, 2020). Kedua, para pemimpin Saudi tidak ingin mengambil risiko yang dapat memicu konflik dengan Tiongkok, mitra dagang terbesar kerajaan tersebut. Saat ini ada banyak kesepakatan yang

dicapai oleh China dan Arab Saudi, hal tersebut menjadikan China sebagai mitra utama Saudi dalam rancangan pembangunan Visi Arab Saudi pada tahun 2030 mendatang (Nashrullah, 2020). Ketiga, pada suatu kunjungan kenegaraan China menawarkan Arab Saudi untuk menandatangani perjanjian kerja sama dalam bidang ekonomi dengan China senilai US\$28 Miliar, atau setara dengan Rp. 389 Triliun (Navlakha, 2109).

Hal ini membuat Arab Saudi semakin bergantung pada Tiongkok, sehingga Arab Saudi harus terus menjaga hubungan baik dengan Tiongkok. Ketiga, Arab Saudi dan Tiongkok berkomitmen untuk mendirikan usaha patungan untuk mengembangkan produksi petrokimia terintegrasi di wilayah tenggara provinsi Liaoning Tiongkok senilai \$10 miliar. Selanjutnya, Otoritas Saham Saudi juga menyatakan telah menandatangani 35 nota kesepahaman tidak mengikat senilai US\$28 miliar, yang melibatkan bidang-bidang seperti energi, pertambangan, transportasi, dan perdagangan online. (Jazeera, 2019).

Kemitraan Ekonomi dengan Negara-negara Maju:

China memiliki kemitraan ekonomi yang erat dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kerja sama ini memberikan China akses ke pasar global dan memungkinkan negara ini untuk mempengaruhi isu-isu HAM dalam konteks ekonomi dan perdagangan internasional. Contoh: China memiliki kemitraan ekonomi yang erat dengan Uni Eropa. Pada tanggal 30 Desember 2020, China dan Uni Eropa menyelesaikan negosiasi perjanjian investasi yang disebut Comprehensive Agreement on Investment (CAI). Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara kedua pihak.

Selanjutnya, China mengandalkan keanggotaan blok regionalnya atau blok regional tertentu untuk mendapatkan dukungan. Sebagai negara dengan pengaruh besar di kawasan Asia, China mungkin mengandalkan dukungan dari negara-negara anggota ASEAN dan negara-negara Asia lainnya yang memiliki hubungan erat dengan China. Keanggotaan dalam blok regional ini dapat memberikan dukungan yang kuat dalam pemilihan dan meningkatkan peluangnya untuk mempertahankan status tetap di Dewan HAM. China mengandalkan keanggotaan blok regionalnya sebagai strategi penting untuk memperkuat posisinya sebagai anggota tetap dalam Dewan HAM PBB. Sebagai negara dengan kehadiran dan pengaruh besar di kawasan Asia, China secara aktif memanfaatkan hubungan dekatnya dengan negara-negara anggota organisasi regional seperti ASEAN, Shanghai Cooperation Organization (SCO), dan Asia-Europe Meeting (ASEM) untuk mencapai tujuan politik dan kepentingan nasionalnya. Melalui keanggotaan dalam blok-blok regional

ini, China memiliki akses ke jaringan dukungan yang kuat dan luas di tingkat regional, yang secara signifikan memperkuat posisinya dalam hubungan internasional.

Dalam kerangka Dewan HAM PBB, dukungan dari negara-negara anggota blok regional memberikan China legitimasi dan kekuatan untuk menghadapi kritik atau tuntutan dari negara-negara anggota lainnya terkait isu-isu HAM. (Definisi, n.d.) Negara-negara anggota blok regional ini dapat menjadi suara bersama yang mendukung pandangan dan kebijakan China dalam isu-isu HAM yang kompleks dan kontroversial. Selain itu, keanggotaan dalam blok regional memungkinkan China untuk bekerja sama dengan negara-negara mitra dalam mencapai tujuan bersama dan menghadapi tantangan global, termasuk dalam konteks hak asasi manusia. Selain itu, menjadi bagian dari blok regional juga memberikan China kesempatan untuk memengaruhi agenda dan kebijakan regional yang kemudian dapat mempengaruhi pandangan negara-negara anggota dalam forum internasional, termasuk Dewan HAM PBB. China menggunakan keanggotaan dalam organisasi-organisasi regional ini sebagai platform untuk mempromosikan pandangannya tentang HAM, mencari dukungan atas inisiatif dan kebijakan yang diusulkan, dan mempengaruhi pendekatan kolektif dalam menangani isu-isu HAM.

Dengan memperkuat hubungan dan kemitraan strategis dalam blok regional, China berhasil memanfaatkan solidaritas dan kebersamaan dalam mempertahankan status tetapnya dalam Dewan HAM PBB. Keanggotaan dalam blok regional membantu China untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas, menghadapi tekanan politik dari negara-negara lain, dan memperkuat legitimasinya sebagai aktor kunci dalam isu-isu HAM di tingkat internasional. Selain itu, China juga dapat berusaha mengurangi kritik terhadap catatan HAM-nya melalui kampanye diplomasi publik atau upaya lain untuk mempengaruhi opini masyarakat internasional. Dengan menggunakan kekuatan lunaknya, seperti media negara dan kebudayaan Tiongkok yang semakin global, China dapat mencoba memperbaiki citranya di mata masyarakat internasional dan meredam kritik terhadap catatan HAM-nya. Selanjutnya, China juga berupaya aktif berkontribusi pada program-program HAM PBB dan berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif yang mendukung hak asasi manusia. Dengan berperan aktif dalam kerja Dewan HAM, China menciptakan kesempatan untuk mempromosikan pandangannya dan memperkuat legitimasinya sebagai anggota tetap. China juga berupaya aktif berkontribusi pada program-program HAM PBB dan berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif yang mendukung hak asasi manusia. Meskipun memiliki catatan pelanggaran HAM yang kontroversial, China menunjukkan komitmen

untuk berperan konstruktif dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di tingkat internasional. Negara ini menyadari pentingnya citra positif dan legitimasi dalam isu-isu HAM, sehingga berusaha memanfaatkan forum Dewan HAM PBB sebagai platform untuk berkontribusi secara aktif. Salah satu bentuk kontribusi China adalah dukungan dan partisipasinya dalam menyusun resolusi-resolusi dan deklarasi-deklarasi HAM.

China turut berperan dalam perundingan dan diskusi untuk mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan beragam negara anggota dalam upaya melindungi hak asasi manusia. Selain itu, China juga menyokong program-program HAM PBB yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan, melindungi hak anak-anak, mengatasi diskriminasi rasial, dan memajukan hak-hak warga negara. Tak hanya itu, China juga berpartisipasi dalam inisiatif-inisiatif regional atau multilateral yang mendukung hak asasi manusia. Negara ini memainkan peran aktif dalam forum-forum regional seperti Forum Kerjasama Tiongkok-Afrika (FOCAC) atau Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika (AACC) untuk mengatasi isu-isu HAM yang relevan bagi negara-negara di kawasan tersebut. Partisipasi China dalam program-program HAM PBB dan inisiatif-inisiatif yang mendukung hak asasi manusia merupakan bukti bahwa negara ini berusaha untuk meningkatkan kontribusinya dalam isu-isu global dan mendukung tujuan HAM di tingkat internasional. Walaupun masih dihadapkan pada kritik dan kontroversi, China menunjukkan komitmen untuk terlibat secara aktif dalam isu HAM dan berperan sebagai pemain penting dalam upaya melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia.

Tidak kalah pentingnya, China dapat mencoba untuk mengakui dan berusaha memperbaiki catatan pelanggaran HAM-nya. Dengan mengambil langkah-langkah nyata untuk mengatasi isu-isu HAM yang kontroversial di dalam negeri, China dapat mencoba mengurangi kritik dari negara-negara anggota lainnya dan memperlihatkan komitmennya pada isu HAM. China dapat mencoba untuk mengakui dan berusaha memperbaiki catatan pelanggaran HAM-nya sebagai bagian dari upaya diplomasi dan perbaikan citra internasionalnya. Meskipun memiliki catatan yang kontroversial dalam isu-isu HAM, China menyadari bahwa keberlanjutan status tetapnya dalam Dewan HAM PBB tergantung pada respons positif terhadap perbaikan dalam hal HAM. Oleh karena itu, negara ini dapat berusaha untuk mengakui beberapa pelanggaran HAM yang telah terjadi, serta memberikan tanda-tanda kemauan untuk melakukan perubahan dan meningkatkan perlindungan HAM di dalam negeri.

Untuk memperbaiki catatan pelanggaran HAM bisa mencakup langkah-langkah seperti membuka dialog dengan masyarakat sipil dan organisasi HAM, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme penegakan hukum, dan mengadopsi undang-undang atau kebijakan baru yang lebih menghormati hak asasi manusia. China juga dapat memberikan akses lebih besar bagi lembaga-lembaga internasional atau mekanisme pemantau HAM PBB untuk melakukan kunjungan atau investigasi terkait isu-isu HAM di negaranya. Dengan demikian, China menunjukkan komitmen untuk terlibat aktif dalam upaya global untuk melindungi hak asasi manusia, serta berupaya untuk mengakui dan memperbaiki catatan pelanggaran HAM yang telah ada. Meskipun upaya ini mungkin membutuhkan waktu dan kemauan politik yang besar, China menyadari bahwa perbaikan dalam catatan pelanggaran HAM-nya akan mendukung posisinya dalam Dewan HAM PBB dan meningkatkan reputasinya sebagai pemain penting dalam politik internasional. Dengan mengambil langkah-langkah ini, China berusaha untuk menciptakan kesempatan untuk menerima lebih banyak dukungan dari negara-negara anggota lainnya dan meningkatkan legitimasinya dalam isu-isu HAM di tingkat global.

E. Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi China untuk mempertahankan status tetap di Dewan HAM PBB hak veto menjadi instrumen untuk mewujudkan diplomasi China terhadap negara anggota PBB mencakup kombinasi diplomasi aktif, upaya untuk mendapatkan dukungan dari aliansi dan blok regional, kampanye diplomasi publik, partisipasi aktif dalam program HAM PBB, dan usaha untuk mengatasi kritik terhadap catatan HAM dinegaranya. Namun, penting untuk dicatat bahwa upaya China ini tetap merupakan subjek kontroversial dan dapat memicu tanggapan beragam dari berbagai pihak di tingkat internasional. Upaya China dalam mempertahankan status tetapnya dalam Dewan HAM PBB dari tahun 2019 hingga 2023 dapat dihubungkan dengan teori neorealisme menurut Kenneth Waltz, yang membedakan neorealisme menjadi realisme defensif dan ofensif. Realisme defensif berpendapat bahwa negara tidak seharusnya mengejar kekuatan secara berlebihan karena pada akhirnya sistem internasional akan mendorong aktor lain merasa terancam dan akan berbalik menyerang negara tersebut. Negara harus menahan diri untuk tidak mengejar power secara berlebihan namun cukup pada kuantitas yang dibutuhkan untuk bisa bertahan Waltz (1985). Hal ini yang menjadi acuan untuk menjelaskan respon anggota PBB terhadap kasus Ham yang terjadi di China mereka memilih menolak untuk diskusi terkait kasus Ham di Xinjiang untuk bertahan demi negaranya.

Dari segi keamanan, China menyadari pentingnya memastikan representasi yang kuat dalam Dewan HAM untuk melindungi kepentingan dan kedaulatan nasionalnya. Sebagai negara dengan kehadiran regional yang dominan, China berusaha untuk meminimalisasikan kritik atau intervensi negatif terkait dengan isu-isu HAM di dalam negeri yang bisa merusak citra negaranya secara internasional. Selanjutnya, dalam aspek kesejahteraan ekonomi, China memiliki kepentingan untuk memperkuat posisinya dalam perdagangan internasional dan investasi. Melalui partisipasi aktif dalam Dewan HAM, China dapat memperkuat legitimasi dan reputasinya sebagai pemimpin global yang kemudian dapat berdampak positif pada hubungan ekonomi dengan negara-negara mitra. China juga berusaha untuk memperkuat prestise internasionalnya dengan mempertahankan status tetap dalam Dewan HAM dan juga kehadirannya di Dewan HAM memberikan negara ini kekuatan dan pengaruh dalam menentukan arah kebijakan HAM di tingkat internasional.

Secara keseluruhan, strategi China dalam mempertahankan status tetapnya dalam Dewan HAM PBB selama periode 2019 hingga 2023 mencerminkan penerapan teori neorealisme ofensif menurut Kenneth Waltz, yang memandang bahwa kekuatan adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap negara. Tujuan negara berinteraksi adalah untuk menjadi hegemon. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus berorientasi pada pemaksimalan kekuatan (Maliki, 2022). China mengutamakan kekuasaannya dalam sistem Internasional yang kompetitif untuk memastikan representasi dan pengaruhnya dalam isu-isu HAM di tingkat internasional. China sebagai aktor utama dalam politik global, menerapkan prinsip neorealisme ofensif untuk strateginya memperkuat posisinya di Dewan HAM PBB. Pertama, dalam aspek kepentingan keamanan, China berusaha untuk mempertahankan status tetapnya dalam Dewan HAM untuk melindungi kedaulatan nasionalnya dan mencegah campur tangan dari negara-negara lain dalam urusan domestiknya terkait hak asasi manusia. Dalam menghadapi kritik dan tuntutan dari negara-negara lain terkait catatan pelanggaran HAMnya, China menggunakan strategi diplomasi dan negosiasi untuk meminimalkan tekanan dan mengamankan dukungan dari negara-negara yang memiliki kepentingan yang sama. Kedua, dalam aspek kepentingan ekonomi, China berusaha untuk mempertahankan status tetapnya dalam Dewan HAM sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk memperkuat posisinya dalam ekonomi global.

Melalui kemitraan ekonomi yang kuat dengan negara-negara lain, China mencari dukungan dan legitimasi dalam upaya mempertahankan status tetapnya di forum

internasional seperti Dewan HAM. Kegiatan ekonomi China yang pesat memberikan negara ini daya tarik bagi banyak negara anggota Dewan HAM, yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkuat posisinya. Ketiga, dalam aspek kepentingan politik, China menggunakan partisipasinya dalam Dewan HAM sebagai sarana untuk mempengaruhi agenda HAM dan kebijakan di tingkat internasional sesuai dengan keinginannya. Dengan memainkan peran aktif dalam forum ini, China dapat memanfaatkan posisinya sebagai negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk memperkuat legitimasi dan pengaruhnya dalam menentukan arah kebijakan HAM di tingkat global.



Daftar Pustaka

Buku

- Agung Banyu Perwita, A., & Mochamad Yani, Y. (2017). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (5th Editio). PT Remaja Rosdakarya.
- Burchill, S., Linklater, A., Devetak, R., Donnelly, J., Patterson, M., Reus-Smit, C., & True, J. (2005). *Theories of international relations. In Explaining the History of American Foreign Relations* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107286207.002>

Jurnal/Skripsi

Definisi. (n.d.).

Dorosh, L., & Ivasechko, O. (2018). *The UN Security Council Permanent Members' Veto Right Reform in the Context of Conflict in Ukraine.*

Dunia, P., dan Kritiknya oleh Robert Keohane, N. O., & Negara Perdagangan oleh Richard Rosecrance, K. (1988). *Neorealisme dan Neoliberalisme* (Vol. 40, Issue 2).

FIRDAUS NUZULA.FISIP neorealism. (n.d.).

Helwig, N. E., Hong, S., & Hsiao-wecksler, E. T. (n.d.). No

主観的健康感を中心とした在宅高齢者における

健康関連指標に関する共分散構造分析Title. 9.

Kotz, D. M. (2002). Globalization and neoliberalism. *Rethinking Marxism*, 14(2), 64–79. <https://doi.org/10.1080/089356902101242189>

Luthfan Prakoso, D., & Aliabbas, A. (2022). *PENGARUH NEGARA GREAT POWERS TERHADAP KAWASAN TANDUK AFRIKA DALAM PERANG RUSIA-UKRAINA*. 5(2). <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v5i2.7132>

Maliki, M. (2022). The Ideology Critique of Mearsheimer's Theory of Offensive Neorealism: The Case of Russia-Ukraine War and Its Ideologization in Indonesia. *Journal Of Global Strategic Studies*, 2(2), 85–108.

<https://doi.org/10.36859/jgss.v2i2.1212>

Nye, J. S. (n.d.). *Review Articles NEOREALISM AND NEOLIBERALISM.*

Prayuda, R., & Sundari, R. (n.d.). *Journal of Diplomacy and International Studies DIPLOMASI DAN POWER: SEBUAH KAJIAN ANALISIS.*

<https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/index>

Purwanto, A. J. (n.d.). PERAN OHCHR DALAM MENANGANI KASUS ETNIK ROHINGYA. In *SPEKTRUM* (Vol. 19, Issue 1).

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/10/121027_burmarohingya.shtml,

Purwasito, A., & Besar, G. (n.d.). Prodi Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN"Veteran" Jakarta NANO POWER DIPLOMACY Out of the Mainstream. In *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* (Vol. 1).

Putri, Y. I., & Ahmadi, S. (2021). Alasan Pemerintah Arab Saudi Mendukung China dalam Kasus Diskriminasi Muslim Uighur. *Politea*, 4(2), 141.

<https://doi.org/10.21043/politea.v4i2.10538>

Quinn, R., & Gibson, B. (n.d.-a). *An analysis of Kenneth Waltz's Theory of international politics.*

Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. In *Journal Equilibrium: Vol. 5 No. 9* (pp. 1–8).

Studi, P., Hukum, I., Syari, F., Universitas, H., Negeri, I., & Yogyakarta, S. K. (2015). *Legitimasi Masyarakat Internasional Terhadap Intervensi Kemanusiaan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2011* Lindra Darnela *Pendahuluan Intervensi kemanusiaan dengan menggunakan kekuatan (use of force) sering kali dilakukan terhadap . 49(1), 1–24.*

Telbami, S. (2002). Kenneth Waltz, Neorealism, and Foreign Policy. *Security Studies*, 11(3), 158–170. <https://doi.org/10.1080/714005344>

Tonny, O. :, & Effendi, D. (1972). *Review Buku CHINA MELAWAN DUNIA*. 63–65.

Website

Ebbighausen, R. (2019). Kenapa Negara Muslim Bungkam Terhadap China Soal Uighur. Dw.Com. <https://www.dw.com/id/kenapa-negara-muslim-bungkam-terhadap-cina-soal-uighur/a-51528889>

INGGRIS TUDUH CHINA LAKUKAN PELANGGARAN HAM MENGERIKAN TERHADAP UIGHUR. (2020). DetikNews.Com. <https://islamic-center.or.id/inggris-tuduh-china-lakukan-pelanggaran-ham-mengerikan-terhadap-uighur/>

